

**MONOGRAFI**

**PARTISIPASI MASYARAKAT  
DAN INTERVENSI PEMERINTAH  
DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR  
DASAR BAGI MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH  
DI WILAYAH PERI-URBAN**

**SRI MARYATI**

*Keterangan gambar sampul:*

*View ke arah Metropolitan Bandung dari Kecamatan Cimencyan, salah satu kawasan peri-urban*

**ISBN No: 978-602-60953-6-7**

**2018**

Hak cipta © pada penulis dan dilindungi Undang-undang

Hak penerbitan pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), Institut Teknologi Bandung

Dilarang mengutip sebagian ataupun seluruh buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin dari penulis dan penerbit.

*Monografi: Partisipasi Masyarakat dan Intervensi Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Dasar bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Wilayah Peri-urban*

Penulis : Sri Maryati

Penyunting : Edi Warsidi

Pewajah Isi : Yuda A. Setiadi

**KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)**

*Monografi: Partisipasi Masyarakat dan Intervensi Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Dasar bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Wilayah Peri-urban/Sri Maryati;*

Edi Warsidi (peny.).—Ed.1.—Cet.1.—Bandung:

SAPPK-ITB, 2018

(vii, 37 hlm.); 21 x 21 cm

ISBN: 978-602-60953-6-7

# PENGANTAR

---

Buku monografi ini merupakan bagian dari hasil penelitian “*Kebijakan Penyediaan Infrastruktur Dasar bagi Masyarakat Miskin di Wilayah Peri-Urban*” yang didanai oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dibawah skema Riset Strategis Nasional 2015-2017. Buku ini berisikan hasil penelitian mengenai kondisi peri-urban, masyarakat berpendapatan rendah di peri-urban, dan kondisi penyediaan infrastruktur dasar, dalam hal ini infrastruktur air minum di peri-urban. Penyediaan ifrastruktur dasar di peri-urban dapat dibagi kedalam bentuk yang merupakan intervensi pemerintah dan partisipasi masyarakat. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat merupakan model yang telah banyak berkembang, mengingat keterbatasan sistem publik yang merupakan intervensi pemerintah.

Bandung, April 2018

Sri Maryati



# DAFTAR ISI

---

**Pengantar iii**

**Daftar Isi iv**

**Daftar Tabel vi**

**Daftar Gambar vii**

## **1 PENDAHULUAN 1**

- 1.1. Latar Belakang **2**
- 1.2. Perumusan Masalah **3**
- 1.3. Tujuan dan Sasaran **4**
- 1.4. Kontribusi Penelitian **5**
- 1.5. Sistematika **5**

## **3 METODE 13**

- 3.1. Pendekatan Studi **14**
- 3.2. Metode Pengumpulan Data **15**
- 3.3. Metode Analisis Data **16**

## **2 Peri-Urban, Karakteristik Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan Penyediaan Infrastruktur: Tinjauan Literatur 6**

- 2.1. Peri-Urban **7**
- 2.2. Karakteristik Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Wilayah Peri-Urban **8**
- 2.3. Karakteristik Penyediaan Infrastruktur Dasar bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Wilayah Peri-Urban **11**

## **4 Kondisi Masyarakat dan Penyediaan Infrastruktur Dasar di Wilayah Peri Urban 17**

- 4.1. Kasus Studi **18**
- 4.2. Karakteristik Fisik, Sosial, dan Penyediaan Air Minum di Peri-Urban Metropolitan Bandung **20**
- 4.3. Karakteristik Sosial dan Penyediaan Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Peri-Urban Metropolitan Bandung **24**

## **5 Kesimpulan dan Rekomendasi 29**

- 5.1. Kesimpulan **30**
- 5.2. Rekomendasi **30**

## **Daftar Pustaka 32**

## **Lampiran 1 36**

## **Lampiran 2 37**

## **Penulis 43**

# DAFTAR TABEL

---

- TABEL 2.1** Karakteristik Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Indonesia **9**
- TABEL 2.2** Karakteristik Penyediaan Infrastruktur bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Peri-Urban **12**
- TABEL 4.1** Jumlah Penduduk dan Kawasan Metropolitan Bandung Tahun 2016 **18**
- TABEL 4.2** Kondisi Pelayanan PDAM di Kawasan Metropolitan Bandung **19**
- TABEL 4.3** Desa-desa yang Terlayani PDAM di Peri-Urban Metropolitan Bandung **21**
- TABEL 4.4** Prosentase KK Miskin di PMB **24**
- TABEL 4.5** Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bandung Tahun 2016 **26**

# DAFTAR GAMBAR

---

- GAMBAR 3.1** Metropolitan Bandung 15
- GAMBAR 4.1** Proporsi Desa Datar, Lereng, dan Lembah di Peri-Urban Metropolitan Bandung 20
- GAMBAR 4.2** Keberadaan Permukiman Kumuh di Desa-desa Peri-Urban Metropolitan Bandung 20
- GAMBAR 4.3** Proporsi Mata Pencaharian Keluarga di Peri-Urban Metropolitan Bandung 20
- GAMBAR 4.4** Prosentase Desa berdasarkan Sumber Air Minum Utama di Peri-Urban Metropolitan Bandung 21
- GAMBAR 4.5** Proporsi Sumber Air Minum Penduduk di Peri-Urban Metropolitan Bandung 23
- GAMBAR 4.6** Proporsi Sumber Air Mandi dan Mencuci Penduduk di Peri-Urban Metropolitan Bandung 23
- GAMBAR 4.7** Proporsi Desa Miskin berdasarkan Sumber Air di Peri-Urban Metropolitan Bandung 26
- GAMBAR 4.8** Reservoir Sistem di Desa Margahayu Tengah 28
- GAMBAR 4.9** Sumber Air Sistem Komunal Ciparungpong Gunung 28







1

# PENDAHULUAN

**Kecamatan Cimencyan, salah satu peri-urban Metropolitan Bandung.**

## 2 | Monografi

### 1.1. Latar Belakang

Proses urbanisasi telah meningkatkan jumlah penduduk perkotaan dengan sangat cepat dan signifikan. Perkembangan yang pesat ini tidak dapat diakomodasi oleh wilayah perkotaan inti, terutama dalam konteks ketersediaan lahan. Menghadapi kenyataan ini, wilayah peri-urban berkembang. Wilayah peri-urban adalah wilayah peralihan antara perkotaan inti dan perdesaan.

UN (2014) menyatakan bahwa pada tahun 2014, 54% populasi dunia tinggal di kawasan perkotaan. Pada tahun 1950, hanya 30% populasi dunia yang tinggal di kawasan perkotaan. Pada tahun 2050 diprediksikan 66% populasi dunia akan tinggal di kawasan perkotaan. Globally. Proyeksi ini menunjukkan bahwa dengan keterbatasan lahan yang ada di perkotaan, kawasan peri-urban akan semakin berkembang. Webster (2002) memperkirakan bahwa pada tahun 2020 sekitar 200 juta penduduk akan mendiami wilayah peri-urban di kawasan metropolitan di Asia Timur, yang merupakan 40% dari total jumlah penduduk di negara-negara tersebut. Allen dkk. (2004) memproyeksikan dalam lima dekade ke depan pertumbuhan populasi dunia akan berada di daerah perkotaan, pertumbuhan dan ekspansi

spasial yang menyertainya akan berada di peri-urban kota-kota sedang dan metropolitan. Pertumbuhan penduduk di wilayah kota inti secara signifikan menurun, sementara pertumbuhan populasi di daerah sekitarnya meningkat (Firman, 2009). Wilayah peri-urban merupakan wilayah yang mengalami urbanisasi paling aktif (Yaqi Shiadkk., 2012).

Salah satu karakteristik wilayah peri-urban adalah alih fungsi lahan yang cukup tinggi (Firman, 2009). Perkembangan wilayah peri-urban didorong oleh beberapa faktor, di antaranya adalah pembangunan properti oleh developer. Winarso (2006) menyatakan bahwa dalam pembangunan kota baru, developer mencari lahan kosong yang luas dan murah, tanpa mempertimbangkan kecukupan infrastruktur.

Lebih lanjut Winarso (2006) menyatakan bahwa secara finansial developer mampu mengembangkan infrastruktur untuk kawasan kota baru yang mereka bangun.

Berbeda dengan perumahan formal yang dikembangkan oleh developer, perkembangan kawasan peri-urban juga ditandai dengan tumbuhnya kawasan-kawasan informal. Kawasan

informal dalam konteks ini adalah kawasan yang dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat sehingga cenderung merupakan kawasan yang tidak teratur. Kawasan informal umumnya belum dilayani oleh infrastruktur. Masyarakat menyediakan sendiri infra-struktur yang dibutuhkan, baik secara individual maupun komunal. Gulyani dkk. (2010) menyatakan bahwa banyak masyarakat dari perumahan yang tidak terencana atau perumahan informal yang tidak terlayani pelayanan dasar, seperti air minum. Masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan informal atau perumahan yang tidak terencana di wilayah peri-urban pada umumnya merupakan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tidak mampu untuk mendapatkan lahan di pusat kota (Adam, 2014). Golongan masyarakat ini pada umumnya menyediakan infrastruktur secara swadaya, yang sifatnya lebih kepada *need-driven* daripada *policy-driven* (Allen dkk., 2006). Masyarakat berpendapat rendah yang tinggal di wilayah peri-urban memiliki kerentanan yang tinggi terhadap permasalahan yang ada karena memiliki kekurangan sarana finansial maupun politik sehingga memiliki akses/kesempatan yang lebih kecil dalam memperoleh pelayanan infrastruktur dasar yang disediakan secara formal

(Allen dkk., 2006). Intervensi yang datang terlambat dari pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dasar dalam bentuk sistem yang tersentralisasi semakin sulit dilakukan, mengingat kepadatan penduduk yang rendah berimplikasi pada mahalnya biaya distribusi (Maryati dkk., 2010), disamping juga tingkat penghasilan masyarakat yang tinggal di perumahan informal pada umumnya rendah.

## 1.2. Perumusan Masalah

Wilayah peri-urban merupakan wilayah transisi. Adanya perbedaan secara konvensional antara wilayah perkotaan inti dan perdesaan belum mampu menjelaskan keadaan dan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah peri-urban, termasuk pada kebutuhan akan penyediaan infrastruktur.

Wilayah peri-urban berkembang karena adanya kejenuhan wilayah perkotaan inti dalam menampung dinamika urbanisasi yang terjadi. Perkembangan wilayah ini pada satu sisi tidak terlepas dari peran developer dalam mengembangkan perumahan-perumahan formal yang dilengkapi dengan berbagai jenis infrastruktur. Pada sisi lain, perkembangan wilayah peri-urban juga tidak terlepas dari

## 4 | Monografi

tumbuhnya perumahan informal, yang umumnya didominasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap lahan di wilayah perkotaan inti. Perumahan informal ini pada umumnya tidak dilayani oleh infrastruktur dasar.

Kebijakan penyediaan infrastruktur di Indonesia pada saat ini belum dapat menjelaskan dan mendukung penyediaan infrastruktur dasar di wilayah peri-urban. Kebijakan yang ada seringkali dinyatakan dalam kerangka kontekstual yang sangat bersifat “kekotaan” atau “kedesaan”. Karakter masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah peri-urban diperkirakan juga berbeda dengan masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan inti dan perdesaan. Untuk menjamin penyediaan dan keberlanjutan infrastruktur dasar di wilayah peri-urban perlu dilakukan identifikasi bentuk-bentuk penyediaan infrastruktur dasar yang sesuai dengan karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut.

Bentuk penyediaan infrastruktur dasar secara garis besar dapat dibagi kedalam bentuk intervensi pemerintah (berupa sistem publik, seperti PDAM) partisipasi masyarakat, dan kombinasi keduanya. Bentuk mana yang

paling tepat untuk diterapkan dalam penyediaan infrastruktur dasar di wilayah peri-urban merupakan hal yang akan dieksplorasi dalam penelitian ini.

### 1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penelitian ini adalah model penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah peri-urban. Infrastruktur dasar yang dikaji dalam penelitian ini adalah infrastruktur air minum. Sasaran dalam penelitian ini adalah:

1. Identifikasi karakteristik masyarakat dan penyediaan infrastruktur bagi masyarakat berpenghasilan rendah di peri-urban.
2. Kompilasi bentuk penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan studi literatur berupa penelitian-penelitian yang telah dilakukan dan kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia
3. Rumusan bentuk penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah peri-urban.

## 1.4. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini berkontribusi secara praktis maupun teoritis. Secara praktis, penelitian ini menghasilkan model penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah peri-urban. Model ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk menyediakan infrastruktur dasar di wilayah peri-urban.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada diskusi tentang penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah peri-urban. Diskusi ini sudah diinisiasi oleh antara lain Allen (2003), Allen dkk. (2006), Gandy (2008), Hofmann (2013), [Díaz-Caravantes dan Wilder \(2014\)](#), [Marston \(2014\)](#), [Mehta dan Karpouzoglou \(2015\)](#), Adams dan Zulu (2015), Van Ewijk dan Ehrhardt (2016). Kasus-kasus yang dibahas pada diskusi yang sudah dilakukan adalah kasus di negara berkembang, namun bukan di Indonesia.

## 1.5. Sistematika

Buku ini disusun dengan sistematikan sebagai berikut:

Bab 1 merupakan pendahuluan, berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, kontribusi penelitian, metoda, sistematika pembahasan

Bab 2 merupakan tinjauan literatur tentang karakteristik peri-urban, karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah, kebijakan penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Bab 3 merupakan penjelasan terkait metoda penelitian, meliputi pendekatan, metoda pengumpulan data, dan metode analisis data

Bab 4 membahas kasus studi penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah peri-urban dan diskusi perumusan model penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah peri-urban.

Bab 5 merupakan simpulan



2

**PERI-URBAN, KARAKTERISTIK  
MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN  
RENDAH, DAN PENYEDIAAN  
INFRASTRUKTUR:  
TINJAUAN LITERATUR**

Jaringan Sistem Komunal Desa Cimenyan

## 2.1. Peri-Urban

Belum ada kesepakatan terkait definisi peri-urban. Namun dari sejumlah definisi yang ada, kawasan peri-urban dapat didefinisikan sebagai kawasan transisi antara perkotaan dan pedesaan. Winarso dkk. (2015) menyatakan bahwa kawasan peri-urban dapat pula didefinisikan sebagai bagian perkotaan yang memiliki karakteristik pedesaan. Batas kawasan peri-urban umumnya tidak pasti.

Woltjer (2014) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antara peri-urban yang terdapat di negara maju dan berkembang. Di negara berkembang, peri-urban mendapat banyak tekanan pembangunan, dan biasanya merupakan transformasi dari aktivitas rural ke *mixed rural* dan aktivitas perkotaan. Wilayah peri-urban di negara maju merupakan hasil dari proses *peri-urbanisation*, yaitu proses urbanisasi di wilayah pinggiran, yang umumnya disebabkan oleh migrasi masyarakat perkotaan ke pedesaan. Namun demikian di Indonesia, kedua karakteristik ini hadir di kawasan peri-urban, terutama peri-urban dari kota-kota besar.

Karakter transisi dari kawasan peri-urban dapat menimbulkan sejumlah persoalan, seperti

penurunan kualitas lingkungan, keterbatasan infrastruktur, dan konflik sosial. Di kawasan ini populasi meningkat dengan cepat, yang menghasilkan kebutuhan akan lahan dan peningkatan nilai lahan (Nkwae, 2006). Wilayah peri-urban mendapatkan keuntungan terkait akses ke kawasan perkotaan, namun umumnya menghadapi kondisi buruknya infrastruktur dasar, seperti air minum dan sanitasi (Wright-Contreras dkk., 2017). Buruknya infrastruktur dasar di kawasan peri-urban umumnya disebabkan oleh ketidaksiapan pemerintah dalam mengantisipasi pesatnya perkembangan kawasan peri-urban.

Pertumbuhan kawasan peri-urban diwarnai oleh dua jenis pembangunan, yaitu pembangunan formal dan informal. Dalam konteks ini pembangunan formal didefinisikan sebagai pembangunan yang dilakukan oleh developer. Pengembangan kawasan formal umumnya dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur oleh developer (Winarso dkk., 2015), sedangkan masyarakat di kawasan informal umumnya menyediakan infrastruktur secara mandiri, baik secara individual maupun komunal. Perbedaan dalam penyediaan infrastruktur

## 8 | Monografi

di kawasan peri-urban telah menimbulkan segregasi (Winarso dkk., 2015).

Masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah peri-urban dapat dikelompokkan kedalam dua kategori. Kategori pertama adalah kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan lahan di pusat kota yang disebabkan oleh kemampuan ekonomi mereka dan harga lahan yang tinggi. Kawasan pinggiran dengan harga lahan yang relatif lebih murah menjadi alternatif untuk bermukim (Grant, 2010). Kategori kedua adalah petani dan pekerja yang terkait dengan sektor pertanian. Perubahan karakteristik kawasan peri-urban yang bertransformasi dari karakteristik desa, yang umumnya terkait dengan pertanian, ke karakteristik kota, yang bersifat non pertanian, telah menimbulkan tekanan terhadap kategori ini (Rakodi, 2018). Kedua kategori ini umumnya tinggal di kawasan informal.

### 2.2. Karakteristik Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Wilayah Peri-Urban

Terdapat sejumlah definisi dan cara mengukur kemiskinan. BKKBN (2017) mendefinisikan miskin berdasarkan konsep kesejahteraan dengan membagi

kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS-I), keluarga sejahtera II (KS-II), keluarga sejahtera III (KS-III), dan keluarga sejahtera III plus (KS-III Plus). Aspek keluarga sejahtera diukur dengan menggunakan 21 indikator. Indikator tersebut terbagi kedalam kebutuhan dasar, kebutuhan psikologi, kebutuhan pengembangan, dan kebutuhan aktualisasi. Kelompok yang dikategorikan penduduk miskin adalah KPS dan KS-I.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS menggunakan istilah garis kemiskinan untuk mengukur kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan (BPS, 2008). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Garis Kemiskinan terdiri dari dua komponen.

World Bank menetapkan garis kemiskinan absolut sebesar US\$



1 dan US\$ 2 PPP (purchasing power parity/paritas daya beli) per hari dengan tujuan membandingkan angka kemiskinan antarnegara/wilayah dan perkembangannya menurut waktu untuk menilai kemajuan yang dicapai dalam memerangi kemiskinan di tingkat global/internasional.

Terdapat sejumlah karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah, yang dapat ditinjau dari segi lokasi, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, akses terhadap infrastruktur, dan penyebabnya, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Karakteristik Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Indonesia

Aspek	Karakteristik	Sumber
Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tinggal di permukiman berkualitas rendah</li> <li>- Tidak memiliki jaminan kepemilikan properti</li> <li>- 2/3 <i>urban</i> MBR terdapat di Pulau Jawa walaupun tingkat kemiskinan di Indonesia Timur (Papua dan NT) jauh lebih tinggi</li> <li>- Prediksi pada 2020 tingkat kemiskinan perkotaan akan lebih dari perdesaan karena proses urbanisasi yang cepat</li> </ul>	World Bank, 2013
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di perkotaan 13,5% (2006) menjadi 8,2% (2014)</li> <li>- Di perdesaan 21,8% (2006) menjadi 13,8% (2014)</li> </ul>	Aji, 2015
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan informal perkotaan/kampung (kumuh, ilegal, bantaran sungai, tanah kosong/terlantar, dataran banjir, dll)</li> </ul>	UN Habitat, 2003
Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan rendah</li> <li>- Garis kemiskinan nasional US\$21/month (perkiraan seluruh MBR/di bawah garis kemiskinan ada 30 juta atau 40% dari RT pada 2011)</li> <li>- Banyak diantaranya bergaji harian atau mingguan</li> <li>- Pendapatan rata-rata per kapita per hari untuk MBR di perkotaan pada Susenas 2010: Rp16.980 (Jawa), Rp14.895 (Sumatra), Rp13.850 (NT), Rp17.980 (Sulawesi), Rp18.365 (Kalimantan), Rp13.770 (Maluku), Rp12.545 (Papua), dan Rp16.480 (seluruh perkotaan)</li> </ul>	UN Habitat, 2003 dan World Bank, 2013
Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengangguran</li> <li>- Pekerja paruh waktu</li> <li>- Wirausaha (buka warung, penjahit, instalatir, penjual dll.)</li> <li>- Informal sektor bergaji rendah (ojek, PRT, tukang gali kubur, tukang parkir, buruh bangunan, dll)</li> </ul>	UN Habitat, 2003 dan World Bank, 2013
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di desa: petani/buruh tani (kegiatan agrikultur) dan pekerja ekstraksi, serta <i>low-end service sectors</i></li> </ul>	Aji, 2015

## 10 | Monografi

Aspek	Karakteristik	Sumber
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tingkat pendidikan rendah</li><li>- Di desa rata-rata di bawah SMP</li></ul>	World Bank, 2013 Hondai, 2005
Akses	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memiliki akses pada infrastruktur yang lebih rendah dibandingkan dengan non MBR</li><li>- Penggunaan bersama pelayanan dasar (toilet, sumber air untuk mandi dan cuci)</li><li>- Jalan tidak beraspal di sekitar permukiman</li></ul>	World Bank, 2013
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Di perdesaan, akses pada pendidikan, kesehatan, dan transportasi sangat rendah</li></ul>	Aji, 2015
Penyebab	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya kesempatan kerja dan PHK besar-besaran</li><li>- Minimnya (akses) modal untuk memulai kegiatan UKM atau berdagang</li><li>- Pendidikan dan kemampuan profesional rendah</li><li>- Kenaikan harga barang pokok</li></ul>	UN Habitat, 2003

Kemiskinan yang terjadi di wilayah peri-urban memiliki ciri yang cukup berbeda dibandingkan dengan yang terjadi baik di perdesaan maupun perkotaan. Urbanisasi yang terjadi telah mendorong banyak perubahan positif di berbagai aspek kehidupan keluarga miskin seperti perluasan kesempatan kerja yang lebih terbuka akan tetapi hal ini tidak serta merta diiringi dengan perubahan pekerjaan dari tenaga kerja secara signifikan yang disebabkan oleh kemampuan dan kompetensi tenaga kerja yang tergolong rendah dan masih terbatas pada kegiatan pertanian yang merupakan lingkungan aktivitasnya di masa lalu (Ramadiani dan Mardiansjah, 2017). Sebagian besar penduduk miskin di wilayah transisi ini merupakan petani yang belum mampu beradaptasi dengan baik sesuai dengan dinamika

perkotaan yang menuntut kemampuan lebih dalam memasuki pasar kerja.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Putti (2011), diketahui pula bahwa sebagian besar penduduk yang tinggal di kawasan kumuh peri-urban Afrika Sub-Saharan selain memiliki penghidupan dari kegiatan pertanian juga usaha kecil di sektor informal yang menurut Allen dkk. (2006) merupakan tipe pekerjaan "*water intensive*" atau bergantung pada penggunaan air seperti kegiatan agrikultur, hortikultura, beternak, pembuat batu bata, produksi tekstil, dan penjual makanan. Dari keseluruhan wilayah metropolitan, masyarakat di wilayah peri-urban cenderung lebih miskin dan lebih tidak berpendidikan, juga paling sulit menjangkau pekerjaan-pekerjaan penting atau strata lebih tinggi (Torres, 2008).

### 2.3. Karakteristik Penyediaan Infrastruktur Dasar bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Wilayah Peri-Urban

Kawasan peri-urban seringkali mengalami marginalisasi dan eklusi dalam penyediaan infrastruktur, sehingga memunculkan isu keadilan dan kesamaan ([Kundu, 2008](#), [Narain, 2014](#)). Olehkarenanya diperlukan suatu pendekatan yang dapat membantu menciptakan kawasan peri-urban yang berkelanjutan ([Marshall, 2016](#)).

Kurangnya infrastruktur di kawasanperi-urbanmenyebabkan masyarakat mencari solusi sendiri untuk permasalahannya ([Nyarko dkk., 2008](#)). [Allen dkk. \(2006\)](#) lebih lanjut menyatakan bahwa di kawasan peri-urban terdapat spektrum penyediaan infrastruktur air minum, dari yang sifatnya policy driven hingga need driven. Beberapa bentuk yang dapat ditemukan di kawasan peri-urban adalah public community, public private cooperation, dan private competition. Ketiadaan infrastruktur dasar dari pemerintah, menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah tergantung pada penjual air keliling, kran umum, dan kios air. Umumnya mereka membayar

lebih mahal dibandingkan dengan yang mendapatkan pelayanan publik ([Kjellén, 2000](#)). Ketiadaan infrastruktur bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga menyebabkan tekanan terhadap lingkungan. 70% masyarakat berpenghasilan rendah tergantung pada air tanah ([Kooy dkk., 2016](#)).

[Bakker dkk. \(2008\)](#) menyatakan bahwa terdapat sejumlah alasan mengapa masyarakat berpenghasilan rendah tidak terkoneksi dengan sistem publik. Alasan-alasan tersebut diantaranya adalah biaya penyambungan, biaya transaksi, status rumah dan lahan, keamanan dan persepsi terhadap kualitas air. Pada beberapa kasus seringkali memang tidak ada jaringan air minum di kawasan berpenghasilan rendah, dan ini yang terjadi di kawasan peri-urban. [Tabel 2.2](#) menunjukkan karakteristik penyediaan infrastruktur bagi masyarakat berpenghasilan rendah di peri-urban.

## 12 | Monografi

Tabel 2.2 Karakteristik Penyediaan Infrastruktur bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Peri-Urban

Karakteristik	Kendala
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sambungan air ilegal/informal</li> <li>- Akses pada kualitas air yang rendah</li> <li>- Air tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari</li> <li>- Petani seringkali menggunakan air limbah yang belum diolah untuk irigasi jika sumber air sedang terbatas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi cenderung tidak dikenali dalam kerangka sektor publik</li> <li>- Akses terhadap air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin di peri-urban cenderung kepada <i>need-driven</i> dibandingkan dengan hasil kebijakan formal</li> </ul>
<p>Praktik penyediaan air yang lebih cenderung kepada <i>need-driven</i>:</p> <p>Sektor Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perolehan sambungan formal dari praktik "suap"</li> <li>- Water kiosk</li> <li>- Proses negosiasi masyarakat</li> </ul> <p>Sektor Privat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informal tankers</li> <li>- Informal vendors yang menjual melalui gerobak, sepeda, dan ember</li> <li>- Air dari sumur pribadi yang kemudian dijual</li> </ul> <p>Komunitas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Rainwater harvesting</i></li> <li>- Pencurian air</li> <li>- Diberi atau membeli dari tetangga</li> <li>- Sambungan terselubung</li> <li>- Sumur komunal</li> <li>- Sambungan pipa hasil persetujuan pemerintah dengan komunitas</li> <li>- Sambungan pipa dan keran komunal yang dikelola oleh komunitas dan dibantu oleh NGO</li> </ul>	

Sumber: Allen dkk. (2006)



11

10

9

7

3

5

# METODE

Pembagi Sistem Komunal Desa Cimenyan

### 3.1. Pendekatan Studi

Kasus yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah di peri-urban. Penelitian ini difokuskan pada wilayah peri-urban karena merupakan wilayah transisi yang memiliki dinamika yang cukup besar baik secara spasial maupun non spasial.

Prinsip yang dipegang dalam penelitian ini adalah bahwa penyediaan infrastruktur dasar tidak dapat disamakan kebutuhan dan penatakelolaannya antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain dan juga tidak dapat disamaratakan antar golongan pendapatan masyarakat.

Wilayah peri-urban merupakan wilayah yang sangat heterogen ditinjau dari aspek lingkungan, sosial-ekonomi, dan politik. Peri-urban merupakan wilayah transisi yang memiliki kekhasan perpaduan antara wilayah perkotaan inti dan wilayah perdesaan. Keheterogenan wilayah peri-urban menyebabkan penyediaan infrastruktur dasar yang ada saat ini dirasa belum mampu secara tepat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang tinggal di dalamnya terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu

dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan spesifik dalam penyediaan infrastruktur bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah peri-urban.

Penelitian ini menggunakan kasus studi di kawasan peri-urban Metropolitan Bandung (PMB). Alasan pemilihan kasus studi ini adalah karena kawasan Metropolitan Bandung (lihat Gambar 3.1) adalah kawasan yang sudah cukup berkembang, dengan akses data yang cukup baik. Di samping pendekatan makro dengan menggunakan data-data sekunder, dalam studi ini juga digunakan pendekatan mikro dengan mengambil kasus penyediaan infrastruktur dasar yang lebih detail di kawasan PMB. Pendekatan makro dan mikro ini digunakan untuk saling melengkapi data, karena tidak semua data tersedia dalam level makro.

Masyarakat berpenghasilan rendah dalam studi ini didekati dari data Desa miskin. Desa miskin dalam kajian ini didefinisikan bila proporsi penduduk miskin di desa lebih dari sama dengan 50%. Kriteria miskin yang digunakan adalah kriteria BKKBN.

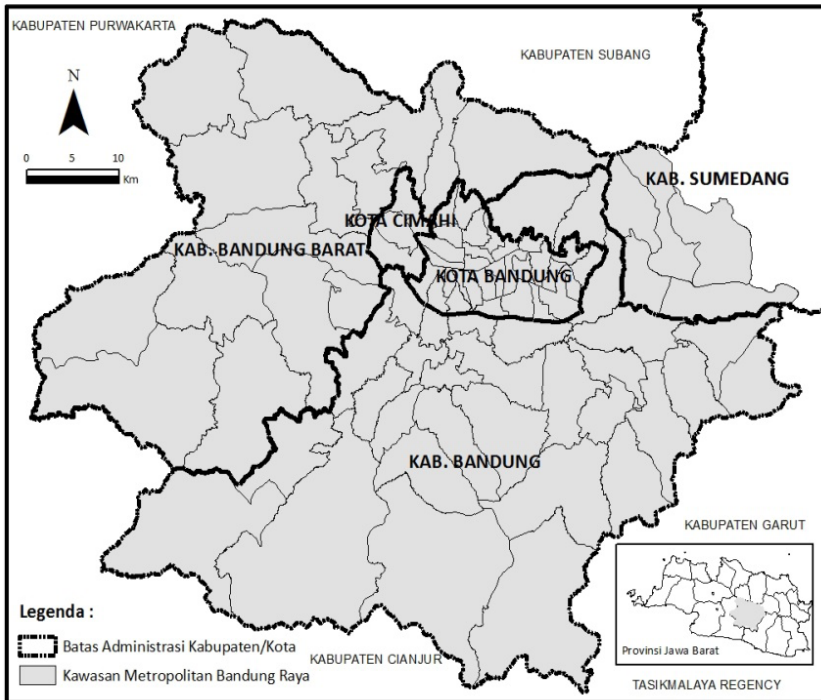
Peri-urban dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kabupaten atau kota, kecamatan yang terdapat dalam kabupaten atau kota, dan desa yang terdapat

dalam kecamatan, yang bukan merupakan kawasan kota inti. Infrastruktur dasar dalam penelitian ini merupakan infrastruktur air minum.

sekunder diperoleh melalui pengumpulan data statistik untuk mengetahui kondisi penyediaan dan pelayanan infrastruktur dasar di wilayah peri-urban, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data sekunder utama yang digunakan adalah data potensi desa. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan, untuk mengetahui pengelolaan sistem berbasis masyarakat.

### 3.2. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dan data primer. Data



Gambar 3.1 Metropolitan Bandung  
(Sumber: Maryati dkk., 2016)

### 3.3. Metode Analisis Data

Metoda analisis data yang digunakan dalam studi ini meliputi:

1. Analisis statistik deskriptif, digunakan untuk mengolah dan mereduksi data-data statistik. Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi masyarakat dan penyediaan infrastruktur di kawasan peri-urban.
2. *Qualitative content analysis* yang ditujukan untuk memilah data yang relevan dan mengklarifikasi informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang berbeda. Analisis ini meliputi *summarising*, *explicating*, dan *structuring* (Flick, 2006). Metode analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penyediaan infrastruktur dasar di wilayah peri-urban bagi masyarakat berpenghasilan rendah





# 4 KONDISI MASYARAKAT DAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR DI WILAYAH PERI URBAN

Saluran Air Sistem Komunal Desa Cimenyan

#### 4.1. Kasus Studi

Kawasan Metropolitan Bandung (KMB) terdiri atas 5 kabupaten dan kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang. Kota Bandung merupakan kota inti dalam Kawasan Metropolitan Bandung sedangkan kabupaten dan kota lainnya dikategorikan sebagai kawasan peri-urban. Kota Bandung merupakan kota inti dengan kepadatan tertinggi. Data tahun 2016 menunjukkan luas Kota Bandung adalah 168 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 2.491.000 jiwa dengan kepadatan 14.827 jiwa/km<sup>2</sup>. Luas KMB adalah 4.799 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk total sebanyak 9.472.000 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 1974 jiwa/km<sup>2</sup> (lihat Tabel 4.1).

Kawasan metropolitan umumnya dibagi ke dalam kawasan perkotaan inti, pinggiran, dan pedesaan. Penyediaan infrastruktur pada umumnya terfokus pada kawasan inti, sedangkan kawasan pinggiran dan pedesaan umumnya sebagai tempat tinggal yang tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai. Kawasan pinggiran dan pedesaan berkembang karena desakan kebutuhan lahan yang tidak dapat diakomodasi lagi oleh kawasan perkotaan inti. Kawasan pinggiran dan pedesaan tidak disiapkan dengan baik untuk menampung limpahan dari kawasan perkotaan inti. Sebagai konsekuensinya timbulah ketimpangan dalam penyediaan infrastruktur.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Kawasan Metropolitan Bandung Tahun 2016

No	Kabupaten /Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)*	Luas wilayah (km2)*	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)*
1	Kota Bandung	2491000	168	14827
2	Kabupaten Bandung	3597000	1768	2035
3	Kabupaten Bandung Barat	1648000	1306	1262
4	Kota Cimahi	594000	39	15231
5	Kabupaten Sumedang	1142000	1518	752
	<b>Total</b>	<b>9472000</b>	<b>4799</b>	<b>1974</b>

\*dibulatkan

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2017

Saat ini terdapat tiga perusahaan daerah air minum yang melayani Kawasan Metropolitan Bandung. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PDAM Kota Bandung, PDAM Kabupaten Bandung, dan PDAM Kabupaten Sumedang. PDAM Kota Bandung melayani Kota Bandung, PDAM Kabupaten Bandung melayani Kota Cimahi,

Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Cakupan pelayanan PDAM Kota Bandung adalah yang tertinggi diantara yang lainnya, sedangkan PDAM Kabupaten Bandung adalah yang terendah. Tarif rata-rata (Rp/m<sup>3</sup>) dari PDAM-PDAM tersebut berkisar antara 4672 hingga 6156.

Tabel 4.2 Kondisi Pelayanan PDAM di Kawasan Metropolitan Bandung

No	PDAM	Cakupan Pelayanan Wilayah Administrasi	Jumlah Pelanggan	Tarif Rata-rata (Rupiah per Meter Kubik)
1	Kota Bandung	71%	154859	6156
2	Kabupaten Bandung	12%	81718	5020
	Kabupaten Bandung Barat			
	Kota Cimahi			
3	Kabupaten Sumedang	21%	28887	4672

Sumber: Perpamsi, 2016

umumnya disebabkan karena kepadatan dan ketidakteraturan yang tinggi, serta kualitas infrastruktur yang rendah atau bahkan tidak ada. Jumlah bangunan terbanyak yang terdapat di kawasan kumuh desa PMB adalah 1250, sedangkan jumlah keluarga 1305. Kedua angka ini menunjukkan bahwa ada beberapa keluarga yang tinggal dalam satu bangunan kumuh. Desa dengan jumlah bangunan dan keluarga kumuh terbanyak terdapat di Desa Bojong, Kecamatan Nagrek. Gambar 4.2 menunjukkan proporsi desa di PMB yang terdapat kawasan kumuh.

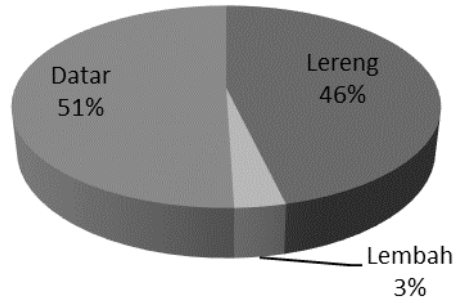
#### 4.2. Karakteristik Fisik, Sosial, dan Penyediaan Air Minum di Peri-Urban Metropolitan Bandung

Topografi desa-desa di PMB dapat diklasifikasikan sebagai desa yang berlereng, desa yang terletak di lembah, dan desa yang berupa dataran. Proporsi dari klasifikasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1.

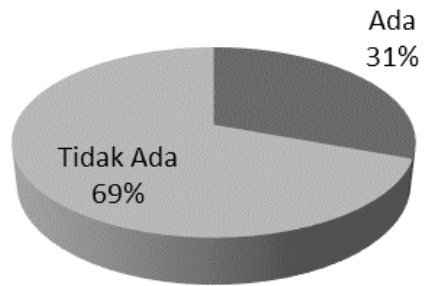
Sebagian besar desa merupakan desa yang terletak di dataran. Namun demikian proporsi desa berlereng juga cukup besar. Penyediaan air minum mempunyai kendala di wilayah berlereng, terlebih jika sumber air terletak pada ketinggian yang lebih rendah dibandingkan dengan permukiman yang akan dilayani.

Karakteristik sosial dalam kajian ini dibatasi pada jenis pekerjaan. Berdasarkan BPS (2014), mata pencaharian utama masyarakat di PMB adalah pertanian. Mata pencaharian pertanian mendominasi sebesar 75%, disusul oleh industri pengolahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi agraris masih mendominasi kondisi di PMB (lihat Gambar 4.3).

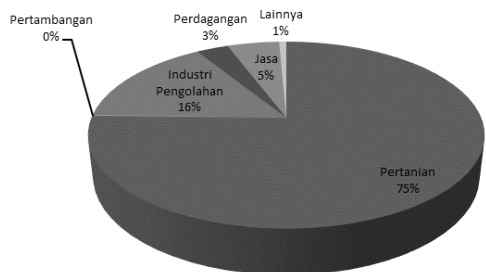
Permukiman kumuh terdapat di 31% desa di PMB. Kondisi kumuh



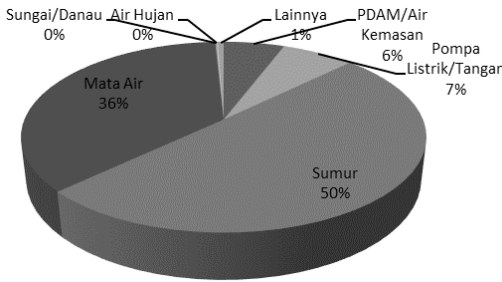
Gambar 4.1 Proporsi Desa Datar, Lereng, dan Lembah di Peri-Urban Metropolitan Bandung



Gambar 4.2 Keberadaan Permukiman Kumuh di Desa-desa Peri-Urban Metropolitan Bandung



Gambar 4.3 Proporsi Mata Pencaharian Keluarga di Peri-Urban Metropolitan Bandung



Gambar 4.4 Prosentase Desa berdasarkan Sumber Air Minum Utama di Peri-Urban Metropolitan Bandung

Berdasarkan data BPS (2014) jumlah penduduk desa di PMB berkisar antara 225 jiwa hingga 13.227 jiwa, dengan rata-rata 1.987 jiwa. Jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Desa Marongge, Kecamatan Tomo, Sumedang, sedangkan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan.

Sumber air minum yang digunakan oleh masyarakat di PMB cukup bervariasi. Sumur merupakan sumber air minum yang digunakan oleh mayoritas

penduduk yang terdapat di desa-desa di PMB. Proporsi penggunaan sumur sebagai sumber air utama mayoritas penduduk di desa-desa PMB adalah 50%. Apabila pompa listrik/tangan dimasukkan juga sebagai sumber air yang menggunakan sumur, maka proporsinya meningkat menjadi 57%. Sumber air yang juga banyak digunakan adalah mata air dengan proporsi 36% (lihat Gambar 4.4). Pengguna PDAM/Air Kemasan masih sangat terbatas, yaitu hanya sebesar 6%. Terdapat 42 Desa yang telah terlayani PDAM atau menggunakan air kemasan (lihat Tabel 4.3). Desa-desa tersebut adalah desa-desa yang terletak dekat dengan kawasan perkotaan PMB.

Data yang bersumber dari BPS (2014) juga menyajikan informasi mengenai sumber air mayoritas yang digunakan oleh penduduk desa. Penggunaan sumber air dibagi atas sumber air untuk minum dan sumber air untuk mandi dan mencuci.

Tabel 4.3 Desa-desa yang Terlayani PDAM di Peri-Urban Metropolitan Bandung

Kecamatan	Desa	Kecamatan	Desa
Paseh	Sukamanah	Situraja	Malaka
Katapang	Cingcin	Darmaraja	Darmajaya
Dayeuhkolot	Pasawahan	Darmaraja	Darmaraja
Bojongsoang	Bojongsari	Darmaraja	Cieunteung
Lembang	Jayagiri	Wado	Wado
Parongpong	Cihanjuang	Jatinunggal	Pawenang

Kecamatan	Desa	Kecamatan	Desa
Ngamprah	Tanimulya	Tomo	Tolengas
Ngamprah	Cilame	Tomo	Tomo
Padalarang	Kertajaya	Tomo	Karyamukti
Cimahi Selatan	Melong	Tomo	Bugel
Cimahi Tengah	Baros	Ujungjaya	Palabuan
Cimahi Tengah	Karangmekar	Ujungjaya	Kebon Cau
Cimahi Tengah	Setiamanah	Conggeang	Babakan Asem
Cimahi Tengah	Padasuka	Paseh	Legok Kidul
Cimahi Tengah	Cimahi	Paseh	Paseh Kidul
Jatinangor	Cipacing	Paseh	Haurkuning
Jatinangor	Sayang	Paseh	Citepok
Tanjungsari	Jatisari	Cimalaka	Cibeureum Kulon
Tanjungsari	Kutamandiri	Cimalaka	Cimalaka
Sumedang Selatan	Regol Wetan	Cimalaka	Serang
Sumedang Selatan	Kotakulon	Cimalaka	Citimun

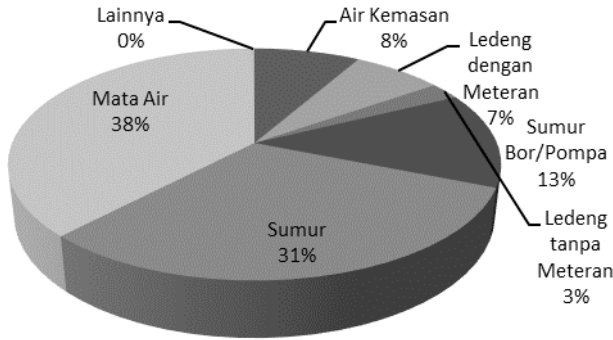
Mata air, sumur, dan sumur bor adalah sumber air minum dengan proporsi terbesar yang digunakan oleh mayoritas penduduk desa, demikian juga untuk mandi dan mencuci (lihat Gambar 4.5 dan Gambar 4.6) walaupun terdapat perbedaan proporsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat penggunaan sumber air alternatif dan sumber air utama, atau di beberapa desa digunakan lebih dari satu sumber air.

Berdasarkan Gambar 4.5 dan Gambar 4.6 terlihat bahwa terdapat dua jenis sistem perpipaan, yaitu ledeng dengan meteran (PDAM) dan ledeng tanpa meteran (perpipaan selain PDAM). Kondisi ini menunjukkan

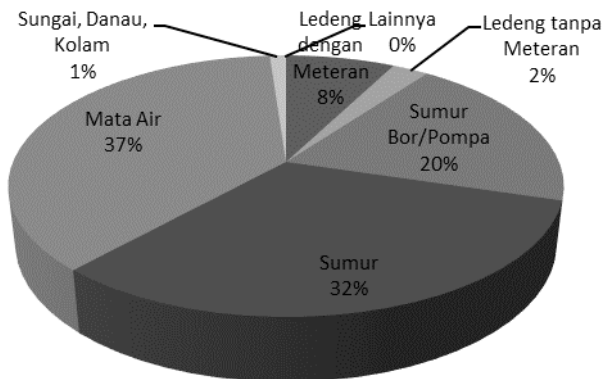
telah berkembangnya sistem komunal penyediaan air minum di peri-urban, walaupun proporsinya tidak terlalu besar. Perlu diperhatikan bahwa data-data pada Gambar 4.5 dan Gambar 4.6 tidak memasukkan data di daerah administratif kota (Kota Bandung dan Kota Cimahi). Sistem-sistem komunal perpipaan banyak berkembang di daerah administratif kota. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat PMB mendapatkan air secara individual dengan menggunakan mata air, sumur, sungai sebagai sumber air. Penggunaan sumber air secara individual menimbulkan beberapa persoalan lingkungan.

Penggunaan sumber air secara individual cenderung lebih besar karena tidak terdapat mekanisme kontrol, misalnya dalam bentuk tarif air yang diukur berdasarkan meteran air. Penggunaan sumber air secara individual juga tidak berijin, karena ijin diperlukan jika air yang diambil dari sumbernya digunakan untuk komersial. Tanpa adanya ijin, penggunaan sumber air juga sulit dipantau.

Selain persoalan lingkungan, penggunaan sumber air secara individual juga menyebabkan persoalan sosial, penduduk yang tidak mempunyai akses sumber air tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa penyediaan air di PMB cenderung bersifat *need driven* daripada *policy driven*.



Gambar 4.5 Proporsi Sumber Air Minum Penduduk di Peri-Urban Metropolitan Bandung



Gambar 4.6 Proporsi Sumber Air Mandi dan Mencuci Penduduk di Peri-Urban Metropolitan Bandung

### 4.3. Karakteristik Sosial dan Penyediaan Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Peri-Urban Metropolitan Bandung

Pada bagian ini dijelaskan mengenai karakteristik sosial dan penyediaan air minum masyarakat berpenghasilan rendah di PMB

#### Karakteristik Sosial

Jumlah keluarga pra sejahtera dan KS 1 di desa-desa PMB berkisar dari 0 hingga 3.309 keluarga dengan rata-rata 627. Jumlah keluarga pra sejahtera dan KS 1 terbanyak terdapat di Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Proporsi keluarga pra sejahtera dan KS 1 berkisar antara 0 hingga 100%, dengan rata-rata 34%. Secara total terdapat 453.930 keluarga berpenghasilan rendah (PS dan KS 1) di PMB dari total 1.438.695 atau sekitar 31,6%.

Prosentase penduduk PRA KS dan KS-1 di desa-desa PMB sangat bervariasi, mulai dari 0% hingga 100%. Desa miskin dalam kajian ini didefinisikan bila proporsi penduduk miskin di desa lebih dari sama dengan 50%. Terdapat 155 desa atau 21% desa yang merupakan desa miskin di PMB. Desa-desa tersebut tersebar di semua kecamatan dan kabupaten atau kota yang merupakan PMB. Daftar desa miskin dan karakteristik sosial serta penyediaan infrastruktur di PMB dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, 100% penduduk desa merupakan penduduk miskin, disusul oleh Desa Sukamanah (98%), Kecamatan Paseh, dan Desa Cikaramas (97.1), Kecamatan Tanjungmedar. Tabel 4.4 menunjukkan desa-desa di PMB dengan prosentase penduduk miskin lebih dari 75%.

Tabel 4.4 Prosentase KK Miskin di PMB

Kecamatan	Desa	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Prosentase KK Miskin
Pacet	Mekarsari	1380	1380	100.0
Paseh	Sukamanah	2500	2450	98.0
Tanjungmedar	Cikaramas	1090	1058	97.1
Cikalong Wetan	Mandalamukti	2371	2290	96.6
Cihampelas	Citapen	2963	2734	92.3
Ibun	Talun	1343	1227	91.4



Kecamatan	Desa	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Prosentase KK Miskin
Cangkuang	Bandasari	1690	1529	90.5
Tanjungmedar	Sukamukti	795	700	88.1
Cililin	Kidangpananjung	1090	958	87.9
Ibun	Tanggulun	1045	912	87.3
Ibun	Neglasari	1021	881	86.3
Ibun	Cibeet	1808	1546	85.5
Cikalong Wetan	Ciptagumati	2139	1794	83.9
Ciparay	Ciheulang	2196	1802	82.1
Majalaya	Neglasari	1999	1629	81.5
Cililin	Karangtanjung	1881	1462	77.7
Ibun	Dukuh	1623	1258	77.5
Pangalengan	Sukamanah	4348	3309	76.1
Ibun	Karyalaksana	1587	1204	75.9
Cikalong Wetan	Cikalong	2475	1874	75.7
Sindangkerta	Puncaksari	1036	781	75.4

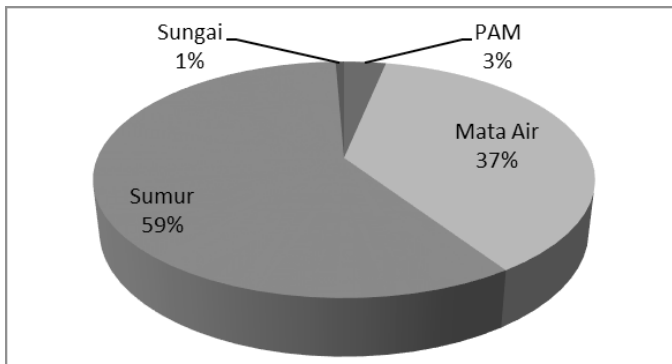
Sumber: Lampiran 2

Desa-desa miskin umumnya tidak dilayani oleh sistem penyediaan air minum publik. Sebagian besar desa miskin atau desa dengan mayoritas penduduk berpenghasilan rendah menggunakan sumber air selain dari sistem publik, seperti sumur dan mata air (lihat Gambar 4.7). Proporsi desa miskin yang mayoritas penduduknya menggunakan PDAM/PAM hanya 3%.

Terbatasnya layanan infrastruktur publik di kawasan peri-urban disebabkan oleh antara lain rendahnya kepadatan penduduk dan jauhnya wilayah tersebut

dari sistem perpipaan yang ada. PDAM sebagai suatu perusahaan tentu berorientasi keuntungan. Kepadatan penduduk yang rendah menunjukkan rendahnya potensi pelanggan dan mahal biaya penyediaan air minum. Kondisi ini diperparah untuk kawasan yang sebagian besar masyarakatnya berpenghasilan rendah.

Seperti dijelaskan dalam Bab 2, karakter masyarakat berpenghasilan rendah adalah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan berpenghasilan rendah. Kondisi ini menyebabkan masyarakat



Gambar 4.7 Proporsi Desa Miskin berdasarkan Sumber Air di Peri-Urban Metropolitan Bandung

Tabel 4.5 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bandung Tahun 2016

Kecamatan	Kepadatan	Kecamatan	Kepadatan
Margahayu*	12405	Banjaran	2947
Dayeuhkolot	11021	Paseh	2587
Margaasih*	8383	Cikancung	2305
Katapang	8121	Cimenyang*	2210
Majalaya	6531	Kutawaringin*	2123
Cileunyi	6311	Cilengkrang*	1767
Baleendah	6289	Ciwidey	1627
Pameungpeuk	5300	Arjasari	1540
Soreang	4587	Ibun	1523
Bojongsoang	4448	Cimaung*	1454
Rancaekek	4075	Pacet	1204
Ciparay	3598	Nagreg*	1079
Solokanjeruk	3531	Pangalengan	770
Cicalengka	3342	Kertasari*	465
Cangkuang	3063	Pasirjambu*	362
		Rancabali	346

\*tidak dilayani PDAM

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2017

berpenghasilan rendah tidak mampu membayar air minum publik. Tarif air minum publik rata-rata di PMB berkisar antara Rp. 4.672/m<sup>3</sup> hingga Rp. 6.156/m<sup>3</sup>. Jika diasumsikan dalam satu keluarga terdapat empat orang dan konsumsi per orang sesuai standar minimal adalah 60 liter/orang/hari, maka dalam satu bulan setiap KK minimal harus membayar kurang lebih Rp 33.638, sedangkan penghasilan masyarakat miskin di Jawa adalah sebesar Rp.16.980 per hari. Nilai Rp.16.980 sebenarnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat sumber air yang bisa didapatkan secara gratis, maka masyarakat akan memprioritaskan penggunaan sumber air tersebut. Hal ini mengindikasikan perlunya subsidi ataupun variasi bentuk penyediaan air minum publik yang lebih murah, seperti kran umum.

Alternatif lainnya adalah menyediakan sumber air komunal dengan bantuan pemerintah atau stakeholder lainnya, dan pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat. Bentuk ini sudah banyak berkembang, khususnya di kelompok masyarakat yang kelembagaannya sudah ber-

Masyarakat peri-urban, seperti yang telah dijelaskan di Bab 2, sebagian besar masih berkarakter agraris. Dalam masyarakat agraris, sifat gotong royong masih kuat, sehingga sistem komunal yang dikelola masyarakat memungkinkan untuk dikembangkan.

Beberapa sistem berbasis masyarakat telah berkembang, diantaranya yang akan dieksplorasi disini adalah sistem yang terdapat di Desa Margahayu Tengah dan Desa Ciparungpung Gunung, Kecamatan Cimenyan.

Sistem di Desa Margahayu Tengah dibangun dengan dana desa. Pembangunan dilakukan sejak tahun 2015. Sumber air yang digunakan berupa sumur dalam. Titik-titik air tersebar berdasarkan RW. Sistem ini digunakan sebagai sumber air minum (konsumsi) dan MCK. Tarif air sebesar Rp 3000/m<sup>3</sup>, dan biaya pemasangan Rp 750.000 per pemasangan. Khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah terdapat potongan 10% untuk biaya pemasangan. Sistem distribusi yang digunakan merupakan sambungan rumah, dengan terlebih dahulu air disimpan di overhead reservoir dan dialirkan secara gravitasi. Pengelola sistem ini adalah anggota masyarakat yang ditunjuk di masing-masing RW, 1 orang per RW. Petugas

## 28 | Monografi

ini mengumpulkan iuran, menyetorkan iuran ke Bumdes, dan melakukan pemeliharaan. Petugas ini dibayar oleh Bumdes. Kendala pengembangan sistem adalah apabila masyarakat memiliki sumber air sendiri yang bagus.

Sistem di Desa Ciparungpung Gunung, Kecamatan Cimenyan memanfaatkan mata air sebagai sumber air sistem komunal. Pada masa pendudukan Jepang, sumber air ini telah digunakan

untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Pembuatan sistem diinisiasi oleh sekelompok masyarakat. Sistem distribusi merupakan sistem gravitasi, tanpa meter air. Air terus menerus mengalir tanpa penampungan. Biaya pemasangan sambungan Rp.1.000.000, dan tarif per bulan Rp.50.000. Sistem pengumpulan tarif belum cukup baik, karena tidak ada sanksi bagi yang tidak membayar. Sistem dikelola per RT (rukun tetangga).



Gambar 4.8 Reservoir Sistem di Desa Margahayu Tengah



Gambar 4.9 Sumber Air Sistem Komunal Ciparungpung Gunung



# 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Broncaptering Sistem Komunal Desa Cimenyan

## 5.1. Kesimpulan

Masyarakat berpenghasilan rendah di PMB adalah 1) masyarakat petani yang penghasilannya semakin berkurang dengan berubahnya karakteristik desa menjadi kota, 2) masyarakat kota yang tidak mendapat lahan di perkotaan inti karena tingginya harga lahan. Golongan berpenghasilan rendah umumnya tinggal di kawasan informal dengan keterbatasan infrastruktur. Secara umum memang infrastruktur di kawasan peri-urban terbatas, namun untuk masyarakat yang tinggal di perumahan formal, infrastruktur disediakan oleh developer.

Tingkat pelayanan infrastruktur publik, yang dalam hal ini disebut sebagai intervensi pemerintah, memang sangat terbatas, Hal ini disebabkan karena kepadatan kawasan peri-urban yang rendah dan juga jauhnya lokasi peri-urban dari pelayanan yang sudah ada, sehingga kawasan ini tidak menjadi prioritas peningkatan pelayanan.

Keterbatasan intervensi pemerintah memicu tumbuhnya sistem-sistem yang diinisiasi masyarakat, dalam hal ini disebut sebagai partisipasi masyarakat. Sistem-sistem yang diinisiasi dan dikelola oleh masyarakat menunjukkan keberhasilan

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan framework yang dikembangkan oleh Allen (2003), Allen dkk (2004), Allen dkk (2006) sistem yang terdapat di PMB juga menunjukkan suatu spektrum. Sistem yang ada di PMB masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap air tanah, mengindikasikan adanya potensi persoalan lingkungan dan sosial.

## 5.2. Rekomendasi

Beberapa bentuk sistem penyediaan infrastruktur yang dapat diterapkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan peri-urban

1. Intervensi pemerintah, berupa sistem publik bersubsidi. Subsidi diberikan dalam bentuk keringanan biaya pemasangan. Inovasi sitem perlu dilakukan agar biaya operasional tidak terlalu mahal seperti kran umum atauun meter air. Intervensi pemerintah dapat dilakukan apabila sudah terdapat jaringan di wilayah yang akan dilayani
2. Partisipasi masyarakat, berupa pengembangan sistem komunal, dengan sumber dana berupa dana desa, bantuan pemerintah, atau

dana swadaya masyarakat. Jika sistem ini dikembangkan pada kawasan yang tingkat pendapatan masyarakatnya bervariasi, subsidi antar golongan pendapatan masyarakat dapat diterapkan. Jika tidak, pengelolaan mandiri yang dilakukan masyarakat sebetulnya dapat mengurangi biaya.



## DAFTAR PUSTAKA

---

- Adam, A.G. 2014. Informal settlements in the peri-urban areas of Bahir Dar, Ethiopia: An institutional analysis. *Habitat International*, 43, pp. 90-97
- Adams, E.A., dan Zulu, L.C. 2015. Participants or customers in water governance? Community - public partnerships for peri-urban water supply. *Geoforum*, 65, pp. 112-124
- Aji, P. 2015. Summary of Indonesia's Poverty Analysis. *ADB Papers on Indonesia*
- Allen, A. 2003. Environmental planning and management of the peri-urban interface: Perspectives on an emerging field. *Environment and urbanization*, 15 (1), pp. 135-148
- Allen, A., Dávila, J., and Hofmann, P. 2004, Governance and access to water and sanitation in the metropolitan fringe: an overview of five case studies (paper delivered to the 5<sup>th</sup> N-Aerus Annual Conference: Urban Governance, Diversity and Social Action in Cities of the South, Barcelona, 15 September
- Allen, A., Dávila, J., and Hofmann, P. 2006. The peri-urban water poor : citizens or consumer?. *International Institute for Environment and Development (IIED)*. 333 Vol 18(2), pp. 333–351
- Bakker, K.; Kooy, M.; Shofiani, N. and Martijn, E. 2008. Governance failure: Rethinking the institutional dimensions of urban water supply to poor households. *World Development* 36(10): pp. 1891-1915
- BKKBN. 2017. Batasan dan Pengertian MDK. <http://aplikasi.bkkbn.go.id> (diakses 24 Desember 2017)
- BPS. 2008. Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2008
- BPS. 2014. Potensi Desa
- BPS Kabupaten Bandung, 2017. Kabupaten Bandung dalam Angka
- BPS Provinsi Jawa Barat, 2017. Provinsi Jawa Barat dalam Angka
- Díaz-Caravantes, R.E., dan Wilder, M. 2014. Water, cities and peri-urban communities: Geographies of power in the context of drought in northwest Mexico. *Water Alternatives*, 7 (3), pp. 417-499



- Firman, T. 2009. The continuity and change in mega-urbanization in Indonesia: A survey of Jakarta–Bandung Region (JBR) development. *Habitat International*, 33, pp.327–339
- Flick, U. 2006. *An Introduction to Qualitative Research*. London: Sage Publications
- Grant, U. 2010. Spatial inequality and urban poverty traps. ODI Working Paper 326, CPRC Working Paper 166
- Gulyani, S. 2010. Inside Informality : The Links between Poverty, Microenterprises, and Living Conditions in Nairobi’s Slums. *World Development* 38:1710-1726
- Hofmann, P. 2013. Wasted waste—disappearing reuse at the peri-urban interface. *Environmental science & policy*, 31, pp. 13-22
- Gandy, M. 2008. Landscapes of disaster: Water, modernity, and urban fragmentation in Mumbai *Environment and Planning A*, 40 (1), pp. 108-130
- Hondai, S. 2005. Profile of poverty and probability of being poor in rural Indonesia. *Working Paper Series, 2005-16*
- Kjellén, M. and McGranahan, G. 2006. Informal water vendors and the urban poor. London, UK: International Institute for Environment and Development, Human Settlements Programme. <http://pubs.iied.org/pdfs/10529IIED.pdf> (diakses 20 Desember 2017)
- Kooy, M., Walter, C. T., Prabaharyaka, I. 2018. Inclusive development of urban water services in Jakarta: The role of groundwater. *Habitat International*, 73, pp. 109-118
- Kundu, N., Pal, M., Saha, S. 2008. East Kolkata Wetlands: A Resource Recovery System through Productive Activities. *Proceedings of Taal 2007: the 12th World Lake Conference*, pp. 868–881
- Marshall, F. 2016. *Recognizing sustainability frontiers in the peri-urban*. *Urbanization & periurbanization: challenges for water governance in South Asia*, 6 (1). pp. 98-102
- Marston, A. 2014. The scale of informality: Community-run water systems in peri-urban Cochabamba, Bolivia. *Water Alternatives*, 7 (1), pp. 72-88
- Maryati, S., Humaira, A.S., Putri, H.T. 2016. Relationship Between Solid Waste Service Characteristics and Income Level in Metropolitan Bandung Raya. *MIMBAR*, Vol. 32, No.

### 34 | Monografi

- 2nd (December, 2016), pp. 233-242
- Maryati, S., Pradono, Kipuw, D.M. 2010. Spatial strategy in improving access to water supply in urban areas. Paper delivered to AIT-KU Joint Symposium on Human Security Engineering, Bangkok, 25-26 November
- Mehta, L. dan Karpouzoglou, T. 2015. Limits of policy and planning in peri-urban waterscapes: The case of Ghaziabad, Delhi, India. *Habitat Int.*, 48, pp. 159-168
- Narain, V., Singh, A.K. 2017. Flowing against the current: The socio-technical mediation of water (in)security in periurban Gurgaon, India. *Geoforum*, Volume 81, pp. 66-75
- Nkwa*, B. 2006. Conceptual framework for modelling and analysing. periurban land problems in Southern Africa. Ph.D. dissertation
- Nyarko, K.B.; Odai, S.N.; Owusu, P.A. and Quartey, E.K. 2008. Water supply coping strategies in Accra. Paper presented at the WEDC International Conference: Access to Sanitation and Safe Water: Global Partnerships and Local Actions, Accra, Ghana, 7-11 April 2008.[http://wedc.lboro.ac.uk/resources/conference/33/Nyarko\\_K2\\_GHA.pdf](http://wedc.lboro.ac.uk/resources/conference/33/Nyarko_K2_GHA.pdf) (diakses 20 Desember 2017)
- Perpamsi, 2016. Direktori Perpamsi
- Rakodi, C. 2018. Poverty in peri-urban interfaces, <https://assets.publishing.service.gov.uk> (diakses 2 Januari 2018)
- Torres, H. D. 2008. Social and environmental aspects of peri-urban growth in Latin America megacities. *United Nations Expert Group Meeting on Population Distribution, Urbanization, Internal Migration and Development*. New York: Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations Secretariat
- UN. 2014. World urbanization prospects: Highlights. Department of Economic and Social Affairs. United Nations, New York
- Van Ewijk, E., Ehrhardt, C. 2016. Land governance in the context of urbanisation and climate change: Linking the rural and the urban. Conference Report Jun. 30-Jul. 1st, 2016. Land Governance for Equitable and Sustainable Development (LANDac), Utrecht(2016)

- Webster, D. 2002. On the edge: shaping the future of peri-urban East Asia. Stanford, CA, Stanford University
- Winarso, H. 2006. **Residential land developers behaviour in Jabotabek, Indonesia.** Unpublished Ph.D Thesis. Bartllet School of Planning
- Winarso, H., Hudalah, D., Firman, T. 2015. Peri-urban transformation in the Jakarta metropolitan area, *Habitat International*, 49, pp. 221-229
- Woltjer, J. 2014. A Global Review on Peri-Urban Development and Planning. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* vol. 25, no. 1
- Wright-Contreras, L., March,H., Schramm, S. 2017. Fragmented landscapes of water supply in suburban Hanoi. [Habitat International, Volume 61](#), pp 64-74
- Yaqi Shia,B., Suna, X., Zhua, X., Li a, Y., Meic, L. 2012. Characterizing growth types and analyzing growth density distribution in response to urban growth patterns in peri-urban areas of Lianyungang City. *Landscape and Urban Planning*, 105, pp. 425– 433

# LAMPIRAN 1

## Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera

Kriteria Kebutuhan	Indikator
Dasar	<p>Makan dua kali sehari atau lebih.</p> <p>Memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian</p> <p>Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik</p> <p>Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan</p> <p>Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi</p> <p>Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah</p>
Psikologis	<p>Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing</p> <p>Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ ikan/telur</p> <p>Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.</p> <p>Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk setiap penghuni rumah</p> <p>Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.</p> <p>Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan</p> <p>Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin</p> <p>Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/ obat kontrasepsi</p>
Pengembangan	<p>Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.</p> <p>Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang</p> <p>Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.</p> <p>Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.</p> <p>Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/ radio/tv/ internet</p>
Aktualisasi	<p>Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial.</p> <p>Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/ yayasan/ institusi masyarakat</p>

Sumber: BKKBN, 2017

# LAMPIRAN 2

## Karakteristik Infrastruktur Desa Miskin

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Keluarga	Jumlah Kel Pra KS dan KS1	Rasio Pra KS dan KS1 terhadap Jumlah Keluarga (%)	Jumlah Kel di Permukiman Kumuh	Sb Air utk Minum/ Masak Mayoritas Keluarga
1	PACET	MEKARSARI	1380	1380	100.0	0	Sumur
2	PASEH	SUKAMANAH	2500	2450	98.0	0	PAM/Air Kemasan
3	TANJUNGMEDAR	CIKARAMAS	1090	1058	97.1	0	Mata Air
4	CIKALONG WETAN	MANDALAMUKTI	2371	2290	96.6	0	Sumur
5	CIHAMPELAS	CITAPEN	2963	2734	92.3	0	Sumur
6	IBUN	TALUN	1343	1227	91.4	0	Pompa Listrik/ Tangan
7	CANGKUANG	BANDASARI	1690	1529	90.5	0	Sumur
8	TANJUNGMEDAR	SUKAMUKTI	795	700	88.1	0	Mata Air
9	CILILIN	KIDANGPANANJUNG	1090	958	87.9	0	Mata Air
10	IBUN	TANGGULUN	1045	912	87.3	0	Sumur
11	IBUN	NEGLASARI	1021	881	86.3	0	Mata Air
12	IBUN	CIBEET	1808	1546	85.5	0	Mata Air
13	CIKALONG WETAN	CIPTAGUMATI	2139	1794	83.9	0	Sumur
14	CIPARAY	CIHEULANG	2196	1802	82.1	0	Sumur
15	MAJALAYA	NEGLASARI	1999	1629	81.5	0	Sumur
16	CILILIN	KARANGTANJUNG	1881	1462	77.7	0	Sumur
17	IBUN	DUKUH	1623	1258	77.5	0	Mata Air
18	PANGALENGAN	SUKAMANAH	4348	3309	76.1	0	Mata Air
19	IBUN	KARYALAKSANA	1587	1204	75.9	15	Sumur
20	CIKALONG WETAN	CIKALONG	2475	1874	75.7	0	Sumur
21	SINDANGKERTA	PUNCAKSARI	1036	781	75.4	0	Sumur
22	CICALENGA	BABAKANPEUTEUY	1927	1442	74.8	8	Sumur
23	PAMEUNGPEUK	RANCATUNGKU	1866	1396	74.8	19	Sumur
24	CILILIN	BATULAYANG	2240	1675	74.8	0	Sumur
25	PACET	CIKITU	1530	1140	74.5	64	Mata Air
26	LEMBANG	MEKARWANGI	1310	975	74.4	0	Mata Air
27	BATUJAJAR	SAGULING	1677	1242	74.1	0	Sumur
28	CIKALONG WETAN	TENJOLAUT	1881	1388	73.8	0	Sumur

## 38 | Monografi

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Keluarga	Jumlah Kel Pra KS dan KS1	Rasio Pra KS dan KS1 terhadap Jumlah Keluarga (%)	Jumlah Kel di Perumahan Kumuh	Sb Air utk Minum/ Masak Mayoritas Keluarga
29	RANCAEKEK	SANGIANG	1386	1022	73.7	29	Pompa Listrik/ Tangan
30	CIPARAY	CIPARAY	1603	1172	73.1	764	Sumur
31	IBUN	LAMPEGAN	1653	1208	73.1	0	Mata Air
32	CIPONGKOR	CIBENDA	1183	864	73.0	0	Sumur
33	IBUN	IBUN	1954	1426	73.0	0	Mata Air
34	IBUN	MEKARWANGI	1739	1245	71.6	0	Mata Air
35	BUAHDUA	BUAHDUA	939	670	71.4	0	Mata Air
36	RANCAEKEK	TEGALSUMEDANG	872	620	71.1	99	Pompa Listrik/ Tangan
37	GANEAS	CIKONDANG	642	456	71.0	0	Mata Air
38	IBUN	SUDI	1326	939	70.8	0	Mata Air
39	NGAMPRAH	CIMANGGU	1774	1241	70.0	0	Mata Air
40	CIHAMPELAS	CIHAMPELAS	3387	2367	69.9	0	Sumur
41	PACET	MEKARJAYA	1423	992	69.7	0	Sumur
42	CIPONGKOR	SIRNAGALIH	1138	789	69.3	0	Sumur
43	CILILIN	RANCAPANGGUNG	2765	1903	68.8	0	Sumur
44	BATUJAJAR	CIPANGERAN	758	520	68.6	0	Mata Air
45	CIKALONG WETAN	CIPADA	1965	1348	68.6	0	Mata Air
46	IBUN	PANGGUH	1964	1335	68.0	0	Mata Air
47	CIPONGKOR	CICANGKANG HILIR	1419	960	67.7	0	Sumur
48	RONGGA	CINENGAH	1724	1158	67.2	0	Sumur
49	CIKALONG WETAN	MEKARJAYA	1836	1230	67.0	0	Mata Air
50	CIPONGKOR	MEKARSARI	1132	756	66.8	0	Sumur
51	CILILIN	CILILIN	2645	1765	66.7	0	Sumur
52	CIPARAY	BABAKAN	1652	1100	66.6	86	Sumur
53	CIKALONG WETAN	RENDE	2901	1913	65.9	0	Sumur
54	CIPARAY	SARIMAHI	1640	1080	65.9	512	Pompa Listrik/ Tangan
55	CIPEUNDEUY	CIROYOM	1556	1024	65.8	0	Sumur
56	TANJUNGMEDAR	WARGALUYU	993	650	65.5	0	Mata Air
57	CIPARAY	PAKUTANDANG	3744	2435	65.0	0	Sumur
58	MAJALAYA	PADAULUN	3555	2306	64.9	0	Sumur

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Keluarga	Jumlah Kel Pra KS dan KS1	Rasio Pra KS dan KS1 terhadap Jumlah Keluarga (%)	Jumlah Kel di Perumahan Kumuh	Sb Air utk Minum/ Masak Mayoritas Keluarga
59	UJUNGJAYA	SUKAMULYA	780	503	64.5	0	Sumur
60	PANGALENGAN	MARGAMULYA	3753	2420	64.5	0	Mata Air
61	PACET	GIRIMULYA	1449	928	64.0	293	Mata Air
62	BOJONGSOANG	BOJONGSARI	3160	2018	63.9	3	PAM/Air Kemasan
63	CIMALAKA	NALUK	1045	665	63.6	0	Sumur
64	CIKALONG WETAN	PUTERAN	1885	1196	63.4	0	Mata Air
65	CIPONGKOR	CIJAMBU	1262	796	63.1	0	Sumur
66	PANGALENGAN	PULOSARI	2419	1504	62.2	0	Sumur
67	CIPEUNDEUY	SIRNARAJA	1730	1068	61.7	0	Sumur
68	CILILIN	MUKAPAYUNG	2645	1630	61.6	0	Sumur
69	CIWIDEY	NENGGELAN	1413	870	61.6	0	Sumur
70	SINDANGKERTA	BUNINAGARA	1013	622	61.4	0	Mata Air
71	ARJASARI	PATROLSARI	1696	1040	61.3	0	Sumur
72	ARJASARI	MANGUNJAYA	1505	921	61.2	0	Mata Air
73	ARJASARI	RANCAKOLE	2018	1234	61.1	0	Sumur
74	PAMULIHAN	CIMARIAS	963	588	61.1	0	Mata Air
75	RANCAEKEK	NANJUNGMEKAR	2150	1305	60.7	9	Pompa Listrik/ Tangan
76	PAMULIHAN	CIPTASARI	1279	776	60.7	0	Sumur
77	CIHAMPÉLAS	TANJUNGJAYA	1810	1095	60.5	0	Sumur
78	GANEAS	CIKONENG	1395	842	60.4	0	Sumur
79	BUAHDUA	CIKURUBUK	566	340	60.1	0	Sumur
80	CICALENGKA	PANENJOAN	2397	1438	60.0	150	Sumur
81	RANCAEKEK	CANGKUANG	2339	1395	59.6	31	Pompa Listrik/ Tangan
82	JATINUNGGAL	CIMANINTIN	931	555	59.6	0	Mata Air
83	IBUN	LAKSANA	1718	1024	59.6	0	Mata Air
84	CILILIN	KARYAMUKTI	929	553	59.5	0	Mata Air
85	CICALENGKA	MARGAASIH	1386	820	59.2	100	Sumur
86	CIPEUNDEUY	NYENANG	1248	738	59.1	0	Sumur
87	BATUJAJAR	JATI	1171	683	58.3	0	Sumur
88	CIPARAY	SERANGMEKAR	2606	1510	57.9	0	Sumur

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Keluarga	Jumlah Kel Pra KS dan KS1	Rasio Pra KS dan KS1 terhadap Jumlah Keluarga (%)	Jumlah Kel di Perumahan Kumuh	Sb Air utk Minum/ Masak Mayoritas Keluarga
89	TANJUNGKERTA	TANJUNGMEKAR	999	575	57.6	0	Sumur
90	SINDANGKERTA	PASIRPOGOR	1116	641	57.4	28	Sumur
91	CIPARAY	MEKARSARI	2425	1391	57.4	0	Sumur
92	CIKANCUNG	MEKARLAKSANA	1330	762	57.3	0	Mata Air
93	CICALENGKA	WALUYA	2070	1184	57.2	0	Sumur
94	PANGALENGAN	TRIBAKTIMULYA	1356	769	56.7	0	Mata Air
95	TANJUNGKERTA	KERTAMEKAR	556	313	56.3	12	Mata Air
96	KERTASARI	NEGLAWANGI	1301	730	56.1	0	Mata Air
97	CICALENGKA	CIKUYA	2674	1494	55.9	51	Sumur
98	WADO	SUKAJADI	1038	579	55.8	0	Mata Air
99	CIMAUNG	MALASARI	1371	764	55.7	0	Sumur
100	TANJUNGMEDAR	KERTAMUKTI	858	476	55.5	0	Mata Air
101	CIBUGEL	TAMANSARI	778	431	55.4	0	Mata Air
102	CIHAMPELAS	SINGAJAYA	1536	850	55.3	0	Sumur
103	SINDANGKERTA	CINTAKARYA	1108	612	55.2	0	Mata Air
104	CIPARAY	GUNUNGLEUTIK	2389	1315	55.0	0	Sumur
105	SUMEDANG SELATAN	CITENGAH	351	193	55.0	0	Sungai/ Danau
106	MAJALAYA	WANGISAGARA	3001	1646	54.8	0	Sumur
107	SINDANGKERTA	RANCA SENGGANG	1321	724	54.8	0	Sumur
108	JATIGEDE	CISAMPIH	851	466	54.8	0	Mata Air
109	PAMEUNGPEUK	RANCAMULYA	2763	1511	54.7	736	Pompa Listrik/ Tangan
110	KERTASARI	CIKEMBANG	1566	855	54.6	0	Mata Air
111	CIPONGKOR	SUKAMULYA	1001	546	54.5	0	Sumur
112	JATINUNGGAL	PAWENANG	1168	637	54.5	0	PAM/Air Kemasan
113	ARJASARI	ARJASARI	2419	1317	54.4	0	Sumur
114	MAJALAYA	MAJASETRA	2296	1249	54.4	0	Sumur
115	PANGALENGAN	MARGAMUKTI	3850	2094	54.4	0	Mata Air
116	CISARUA	CIPADA	1714	932	54.4	0	Mata Air
117	CIPONGKOR	SARINAGEN	1834	997	54.4	0	Sumur
118	BOJONGSOANG	BOJONGSOANG	4225	2293	54.3	24	Pompa Listrik/ Tangan



No	Kecamatan	Desa	Jumlah Keluarga	Jumlah Kel Pra KS dan KS1	Rasio Pra KS dan KS1 terhadap Jumlah Keluarga (%)	Jumlah Kel di Perumahan Kumuh	Sb Air utk Minum/ Masak Mayoritas Keluarga
119	UJUNGJAYA	KEBON CAU	951	512	53.8	0	PAM/Air Kemasan
120	CIPONGKOR	CIJENUK	1518	817	53.8	0	Sumur
121	CIKALONG WETAN	WANGUNJAYA	1427	766	53.7	0	Mata Air
122	CIPONGKOR	BARANANGSIANG	1887	1012	53.6	0	Sumur
123	CIHAMPÉLAS	PATARUMAN	2333	1249	53.5	0	Sumur
124	PACET	CINANGGELA	1041	556	53.4	0	Mata Air
125	MAJALAYA	SUKAMAJU	4326	2310	53.4	0	Sumur
126	CIKALONG WETAN	GANJARSARI	1685	898	53.3	0	Mata Air
127	SITURAJA	CIKADU	601	319	53.1	0	Mata Air
128	WADO	CIKAREO SELATAN	1040	552	53.1	0	Mata Air
129	SUMEDANG SELATAN	CIPAMEUNGPEUK	1436	762	53.1	0	Mata Air
130	CIPONGKOR	CINTAASIH	1691	897	53.0	0	Mata Air
131	CIPONGKOR	KARANGSARI	1164	617	53.0	0	Sumur
132	TOMO	TOMO	1020	540	52.9	22	PAM/Air Kemasan
133	PASEH	SINDANGSARI	2683	1420	52.9	0	Mata Air
134	CIKANCUNG	CIHANYIR	1373	726	52.9	0	Sumur
135	BUAHDUA	KARANGBUNGUR	543	287	52.9	0	Mata Air
136	MAJALAYA	PADAMULYA	3696	1950	52.8	25	Sumur
137	JATINUNGGAL	TARIKOLOT	1036	545	52.6	0	Mata Air
138	CIPEUNDEUY	CIPEUNDEUY	1328	696	52.4	0	Sumur
139	CIMAUNG	CIKALONG	2648	1387	52.4	0	Sumur
140	CICALENGKA	NAGROG	1668	871	52.2	4	Sumur
141	ARJASARI	PINGGIRSARI	2236	1167	52.2	0	Mata Air
142	PASEH	SUKAMANTRI	3495	1820	52.1	0	Sumur
143	JATINANGOR	HEGARMANAH	2015	1046	51.9	0	Mata Air
144	MAJALAYA	MAJAKERTA	2554	1320	51.7	0	Sumur
145	RANCAKALONG	CIBUNAR	923	477	51.7	0	Sumur
146	CIPEUNDEUY	CIHARASHAS	1492	771	51.7	0	Sumur
147	RANCAEKEK	LINGGAR	2450	1263	51.6	60	Pompa Listrik/Tangan
148	KERTASARI	SANTOSA	1278	658	51.5	0	Mata Air
149	CIMAUNG	MEKARSARI	1700	872	51.3	0	Sumur

## 42 | Monografi

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Keluarga	Jumlah Kel Pra KS dan KS1	Rasio Pra KS dan KS1 terhadap Jumlah Keluarga (%)	Jumlah Kel di Perumahan Kumuh	Sb Air utk Minum/ Masak Mayoritas Keluarga
150	PACET	NAGRAK	2235	1135	50.8	45	Mata Air
151	PASEH	TANGSIMEKAR	1997	1009	50.5	0	Sumur
152	ARJASARI	ANCOLMEKAR	1481	748	50.5	0	Mata Air
153	CIMAUNG	SUKAMAJU	1298	654	50.4	0	Sumur
154	SUMEDANG UTARA	MARGAMUKTI	1165	585	50.2	0	Sumur
155	LEMBANG	SUKAJAYA	2722	1365	50.1	0	Mata Air

**SRI MARYATI** adalah dosen pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung. Sri Maryati merupakan peneliti pada Kelompok Keahlian Sistem Infrastruktur Wilayah dan Kota, ITB. Sri Maryati telah melakukan penelitian dan menghasilkan beberapa publikasi dalam bentuk jurnal, prosiding, maupun buku ajar dengan fokus pada perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan infrastruktur dalam perspektif wilayah dan kota.



